

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan evaluasi dan telaahan terhadap Rencana Kerja tahun sebelumnya, isu-isu penting/strategis terkini. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan berisikan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2024 untuk menjawab atau meminimalisir isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan di bidang Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 kami susun, semoga dapat menjadi pedoman dalam melakukan Kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat di tahun 2024.

Pangkalan Bun, Juli 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,

M.NURSYAH IKHSAN, S.IP, M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 19770422 200312 1 004



D A F T A R I S I

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I Pendahuluan 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 4

 1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

 TAHUN 2022 6

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 16

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH 18

BAB V PENUTUP 28

Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam rangka mendukung Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif
2. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai langkah preventif mengurangi potensi bencana
3. Mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang aman dan demokratis
4. Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsive
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah tersebut dijabarkan kedalam sasaran strategis SKPD dan setiap tahunnya mempunyai target. Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan program dan kegiatan yang ditampung dalam suatu Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja ini juga harus mengacu kepada RPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah program dan rencana kerja disusun dan anggaran/pagu indikatif ditentukan oleh tim anggaran maka Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD) pun dapat disusun untuk diusulkan kepada DPRD.



Tematik dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Tematik :

Akselerasi ekonomi dan sumber daya lokal disertai peningkatan SDM menuju Kobar sejahtera dan mandiri

Prioritas Pembangunan Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Prioritas 1 : Penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menghadapi pilkada dan pilpres.
- b. Prioritas 2 : Peningkatan perbaikan infrastruktur dasar dan perekonomian dalam menunjang SDM.
- c. Prioritas 3 : Pendampingan pelaku usaha lokal yang berdaya saing di bidang UMKM dan pariwisata.
- d. Prioritas 4 : Penguatan sarana dan prasarana lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.
- e. Prioritas 5 : Penerapan inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien

1.2.Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 mengacu kepada :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;



- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);



- 19) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 9).
- 20) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Agar perencanaan kegiatan dan program lebih terarah dan sesuai dengan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat dan Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Menjabarkan rencana kerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
3. Sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024, terdiri dari :

| | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| | 1.1.Latar Belakang |
| | 1.2.Landasan Hukum |
| | 1.3.Maksud dan Tujuan |
| | 1.4.Sistematika Penulisan |
| BAB II | : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU |
| | 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan capaian Renstra SKPD |
| | 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPD |
| | 2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD |
| | 2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKP |
| | 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat |
| BAB III | : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH |
| | 3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional |
| | 3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah |
| | 3.3.Program dan Kegiatan |
| BAB IV | : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH |
| BAB V | : PENUTUP berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. |



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 di evaluasi sebagai berikut :

Tabel 1. Rata-rata Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022

| No. | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | 170.117.781.735,63 | 224.651.929.841,28 | 392.154.004.398,55 | 233.165.265.534,65 |
| 1.1.1. | Pajak daerah | 51.420.122.949,53 | 65.128.605.841,17 | 70.390.166.393,05 | 81.575.790.318,70 |
| 1.1.2. | Retribusi daerah | 13.447.260.456,00 | 13.208.556.926,00 | 12.591.474.840,30 | 15.782.458.937,00 |
| 1.1.3. | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 8.941.166.757,00 | 9.804.364.851,00 | 12.470.117.812,00 | 12.940.075.581,00 |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang sah | 96.309.231.573,10 | 136.510.402.223,11 | 296.702.245.353,20 | 122.866.940.697,95 |

Data per : 31 Desember 2022

Dengan adanya SKPD Badan Pendapatan Daerah, diharapkan target Pendapatan khususnya pajak daerah dan PAD secara umum dapat tercapai dan ini merupakan sebuah tantangan yang cukup berat.



Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 7.017.132.338,00 | 6.650.807.757 | 94,78 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11.470.000,00 | 11.470.000 | 100 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 100 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 100 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 100 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 100 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 100 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 100 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.176.942.920,00 | 4.880.888.676 | 94,28 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.995.738.120,00 | 4.704.002.526 | 94,16 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 141.116.000,00 | 136.953.500 | 97,05 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 39.588.800,00 | 39.432.650 | 99,61 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 500.000,00 | 500.000 | 100,00 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1.250.000,00 | 990.192 | 79,22 |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1.250.000,00 | 990.192 | 79,22 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 19.500.000,00 | 98.626.500 | 97,11 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 82.060.000,00 | 19.500.000 | 100,00 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 19.500.000,00 | 79.126.500 | 96,43 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 412.739.143,00 | 411.954.354 | 99,81 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.419.720,00 | 7.419.720 | 100,00 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 120.852.589,00 | 120.808.766 | 99,96 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 59.848.914,00 | 59.844.616 | 99,99 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 70.463.920,00 | 70.452.470 | 99,98 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 154.154.000,00 | 153.428.782 | 99,53 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 686.818.308,00 | 661.365.199 | 96,29 |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 465.750.000,00 | 447.900.000 | 96,17 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 25.000.000,00 | 18.622.783 | 74,49 |
| Pengadaan Mebel | 32.861.000,00 | 32.800.000 | 99,81 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 113.207.308,00 | 112.586.416 | 99,45 |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000,00 | 49.456.000 | 98,91 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 470.921.947,00 | 439.091.736 | 93,24 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.050.000,00 | 165.000 | 15,71 |



| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 233.235.547,00 | 216.084.294 | 92,65 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 236.636.400,00 | 222.842.442 | 94,17 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 155.430.020,00 | 146.421.100 | 94,20 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 22.994.720,00 | 146.421.100 | 94,20 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 46.947.800,00 | 18.559.300 | 80,71 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 51.387.500,00 | 42.956.800 | 91,50 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 34.100.000,00 | 50.980.000 | 99,21 |
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 2.909.571.662 | 2.353.280.775 | 80,88 |
| Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 2.909.571.662 | 2.353.280.775 | 80,88 |
| Perencanaan pengelolaan pajak daerah | 9.260.000,00 | 8.807.000 | 95,11 |
| Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | 446.065.900,00 | 37.9167.022 | 85,00 |
| Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 107.811.035,00 | 93.294.035 | 86,53 |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 144.089.462,00 | 143.375.000 | 99,50 |
| Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 117.080.400,00 | 116.912.000 | 99,86 |
| Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 864.609.965,00 | 460.091.500 | 53,21 |
| Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 23.999.800,00 | 22.621.750 | 94,26 |
| Penetapan Wajib Pajak Daerah | 283.914.500,00 | 277.737.530 | 97,82 |
| Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 10.980.900,00 | 10.960.000 | 99,81 |
| Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 123.638.000,00 | 117.612.600 | 95,13 |
| Penagihan Pajak Daerah | 554.565.000,00 | 543.533.748 | 98,01 |
| Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 158.636.700,00 | 122.072.590 | 76,95 |
| Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 57.830.000,00 | 50.796.000 | 87,84 |
| Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 7.090.000,00 | 6.300.000 | 88,86 |
| | | | |



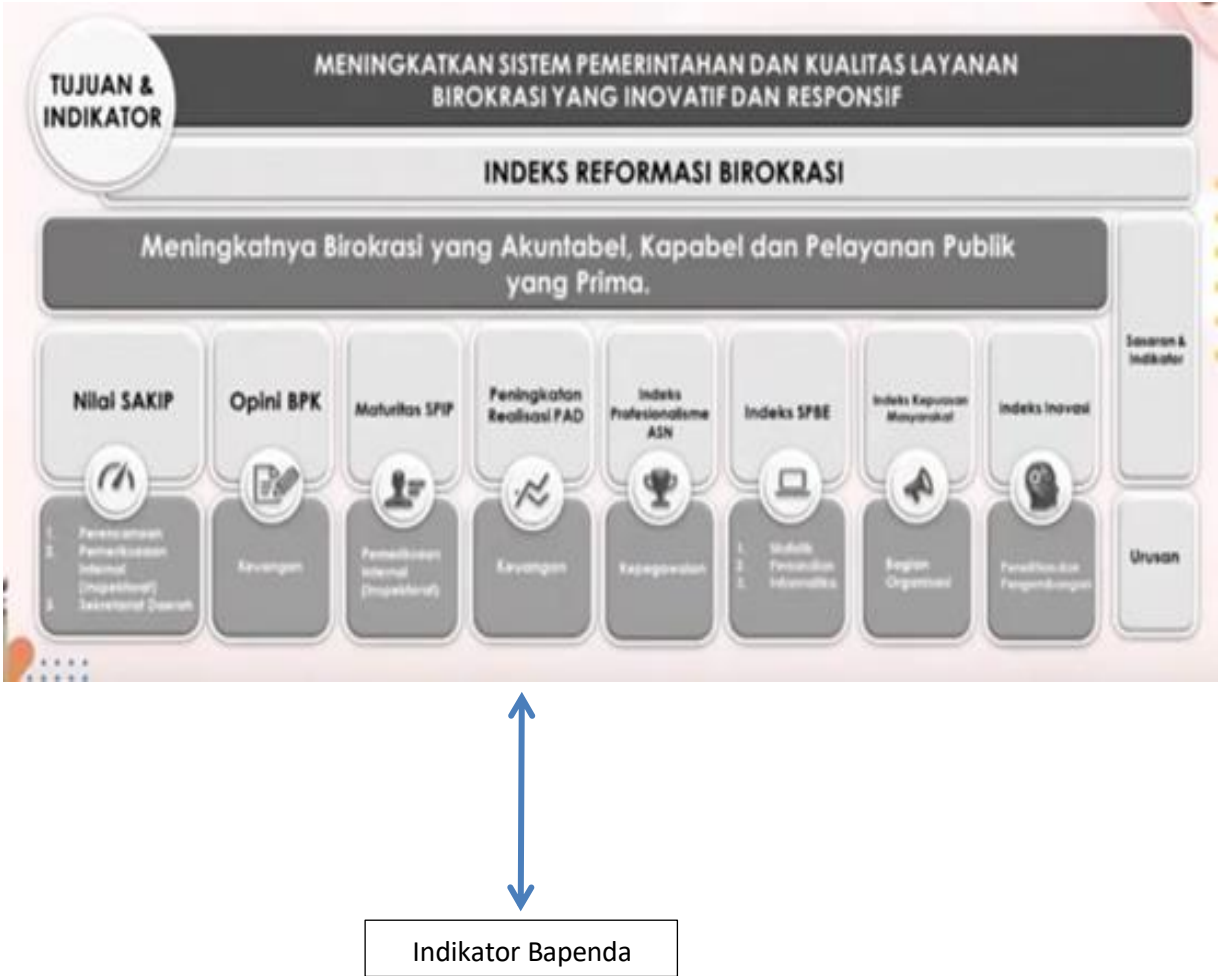
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun kondisi yang diharapkan pada tahun 2023-2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

| No. | Uraian | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | Pendapatan | 1.357.017.031.000,00 | 1.387.822.762.000,00 | 1.421.590.485.000,00 | 1.459.657.052.000,00 |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | 236.083.168.000,00 | 245.277.574.000,00 | 255.207.433.000,00 | 265.636.964.000,00 |
| 1.1.1. | Pajak daerah | 72.853.822.000,00 | 80.139.205.000,00 | 88.153.126.000,00 | 96.968.439.000,00 |
| 1.1.2. | Retribusi daerah | 13.340.642.000,00 | 14.674.707.000,00 | 16.142.178.000,00 | 17.756.396.000,00 |
| 1.1.3. | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 14.423.916.000,00 | 14.998.873.000,00 | 15.447.340.000,00 | 15.447.340.000,00 |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang sah | 135.464.789.000,00 | 135.464.789.000,00 | 135.464.789.000,00 | 135.464.789.000,00 |

Tabel 4. Indikator Kinerja Urusan Pendapatan Daerah





Poin penting pengukuran kinerja Badan pendapatan daerah kabupaten kotawaringin barat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Yang apabila diterjemahkan dalam target yang ingin dicapai selama 4 tahun dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Target PAD di Renstra 2023-2026

| No | Uraian | 2022 (APBD) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | PENDAPATAN | 1.393.013.211.900,00 | 1.357.017.031.000,00 | 1.387.822.762.000,00 | 1.421.590.485.000,00 | 1.459.657.052.000,00 | 1,20% |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 291.482.330.100,00 | 236.083.169.000,00 | 245.277.574.000,00 | 255.207.433.000,00 | 265.636.964.000,00 | -1,74% |
| 1.1.1 | Pajak daerah | 95.650.000.000,00 | 72.853.822.000,00 | 80.139.205.000,00 | 88.153.126.000,00 | 96.968.439.000,00 | 1,54% |
| 1.1.2 | Retribusi daerah | 34.815.223.900,00 | 13.340.642.000,00 | 14.674.707.000,00 | 16.142.178.000,00 | 17.756.396.000,00 | -7,92% |
| 1.1.3 | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 13.876.150.000,00 | 14.423.916.000,00 | 14.998.873.000,00 | 15.447.340.000,00 | 15.447.340.000,00 | 2,73% |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yang sah | 147.140.956.200,00 | 135.464.789.000,00 | 135.464.789.000,00 | 135.464.789.000,00 | 135.464.789.000,00 | -1,98% |

Dari target tersebut, untuk tahun 2022 secara keseluruhan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Kinerja Per Sasaran

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Predikat Kinerja |
|----|--|--|---------------|-----------|-------------|------------------|
| 1. | Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah | Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah | 14,27% | 16,50% | 115,62% | Sangat Tinggi |
| 2. | Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 95,56% | 77,53% | 81,13% | Tinggi |
| 3. | Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah | 90% | 94,78% | 105,3% | Sangat Tinggi |
| 4. | Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah | Nilai SAKIP perangkat Daerah (Penilaian di Tahun Berjalan) | 81 Kategori A | A | 100% | Sangat Tinggi |



Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Predikat Kinerja |
|----|--|---|--------|-----------|-------------|------------------|
| 1. | Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah | Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah | 14,28% | 16,50% | 115,62% | Sangat Tinggi |
| 2. | Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 95,56% | 77,53% | 81,13% | Tinggi |
| | | Rata-rata capaian | | | 98,37% | |

Tabel 8.
Capaian Indikator Kinerja Sesuai RPD Urusan Pendapatan Daerah Tahun 2022

| No. | Indikator | 2022 | |
|-----|--|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi |
| 1. | Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah (%) | 14,28 | 16,50 |

Pencapaian Kinerja terhadap IKU daerah adalah sebagai berikut:

Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah (%) adalah Rp. 233.165.265.534,65 dibagi Rp. 1.412.954.169.584,52 dikali 100% adalah sebesar **16,50%**. Untuk Tahun 2022 tercapai.



Tabel 9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat

| No | Indikator Kinerja | Target SDG'S | Target SPM/NSPK | Target IKK | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | | |
|----|---|-----------------|--------------------|---------------|---|------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)Pendapatan Daerah (%) | - | - | 14,28 | 14,2 | 11,8 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 13,4 | 14,2 | 12,5 | 15,5 | 24 | 16,50 | 94,5 | 120,6 | 105,7 | 129,8 | 156,9 | 115,6 |



2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten, yang dipimpin oleh Kepala Badan dan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*strengthness*) maupun kelemahan (*weakness*) dalam organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang peningkatan kinerja meliputi :

1. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan tujuan serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.
2. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif.

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah, yaitu :

1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah.
2. Masih belum efektifnya forum koordinasi antar SKPD Penghasil dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar benar akurat dan teruji.

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*opportunities*) maupun ancaman (*threats*) dalam



organisasi. Beberapa peluang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. antara lain :

1. Sebagai Kota yang memiliki Pelabuhan Sungai. Pelabuhan Laut dan Bandar Udara dan berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kotawaringin Barat yang memiliki tenaga kerja yang banyak sehingga potensi bertambahnya Wajib Pajak (WP) cukup terbuka
2. Berkembangnya kunjungan wisata ke Kota Pangkalan Bun memungkinkan peningkatan Pendapatan Daerah.
3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat.

Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. adalah :

1. Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mentaati ketentuan pembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur;
2. Belum meratanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga.
3. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang ketentuan pajak dan retribusi daerah.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal tersebut pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Badan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.



2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan SKPD bisa diusulkan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan bisa diusulkan SKPD kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui forum SKPD maupun forum lainnya sebelum penyusunan rencana kerja.

Program dan kegiatan tahun 2024 secara spesifik **tidak ada** program/kegiatan usulan masyarakat yang terangkum dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran Volume | Catatan |
|-----|-----------------------------|--------|-------------------|----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tidak Ada Usulan Masyarakat | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan suatu pendanaan. Disinilah tugas Badan Pendapatan Daerah Sebagai Koordinator Pajak Daerah dan Koordinator Retribusi Daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Dibutuhkan kerja keras Badan Pendapatan Daerah sebagai pendongkrak Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan program prioritas tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Namun untuk kondisi Rencana strategis periode ini hanya untuk 4 tahun saja yaitu tahun 2023 hingga 2026. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif
2. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai langkah preventif mengurangi potensi bencana
3. Mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang aman dan demokratis
4. Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsive
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia



Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah, khususnya pada tujuan Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif dengan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang akan dicapai adalah Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan pelayanan Publik yang Prima maka diturunkan menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai berikut :

Tujuan Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah

Indikator Sasaran Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Nilai SAKIP perangkat daerah



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang tercantum dalam bab sebelumnya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki dua program yaitu :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk Tahun 2021 dan 2022, dan di 2023 pelaksanaan program dan kegiatan sudah mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019. Untuk Tahun 2023 terdapat penambahan sub kegiatan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Rincian program dan kegiatan sebagaimana terlampir)



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Kotawaringin Barat
Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | |
|------|----|----|------|----|--|---|---|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif(Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | Badan Pendapatan Daerah | | | | | | | 14.915.904.000,00 | | 12.968.208.000,00 | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 14.915.904.000,00 | | 12.968.208.000,00 | | | | |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | | | | 14.915.904.000,00 | | 12.968.208.000,00 | | | | |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | 4.622.978.000,00 | | 4.622.978.000,00 | | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | | 4.622.978.000,00 | | 4.622.978.000,00 | | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 01 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 2 Dokumen | 4 Laporan | 20.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 2 Dokum en | 20.000.000,00 |
| | | | | | | | Persentase Realisasi Pajak Daerah | | | | 85.50 % | | | | | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 6 Dokumen | 4 Laporan | 479.978.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembang an Pajak Daerah dan | 6 Dokum en | 479.978.000,00 |
| | | | | | | | Persentase Realisasi Pajak Daerah | | | | 85.50 % | | | | | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 6 Laporan | 4 Laporan | 150.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan danPenyeba rluasan Kebijakan Pajak | 6 | 150.000.000,00 |
| | | | | | | | Persentase Realisasi Pajak Daerah | | | | 85.50 % | Laporan | | | | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana PengelolaanPajak Daerah | Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 60 Unit | 4 Laporan | 400.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Sarana danPrasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 60 Unit | 400.000.000,00 |
| | | | | | | | Persentase Realisasi Pajak Daerah | | | | 85.50 % | | | | | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |



| Kode | | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | |
|------|----|----|------|----|---|---|--|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|---|---------------------|------------------------|--------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | | Tolok Ukur | Target | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan Persentase Realisasi Pajak Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 11 Laporan | 4 Laporan 85.50 % | 310.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan danPendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 11 Laporan | 310.000.000,00 | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan Persentase Realisasi Pajak Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 2 Laporan | 4 Laporan 85.50 % | 600.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaa n, danPelaporan Basis Data Pajak Daerah | 2 Laporan | 600.000.000,00 | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan Persentase Realisasi Pajak Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 1700 Obyek Pajak | 4 Laporan 85.50 % | 85.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Objek Pajakyang Disesuaikan NJOP nya | 1700 Obyek Pajak | 85.000.000,00 | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan Persentase Realisasi Pajak Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 126000 Dokumen | 4 Laporan 85.50 % | 845.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 126000 Dokume n | 845.000.000,00 | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan Persentase Realisasi Pajak Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 11 Layanan | 4 Laporan 85.50 % | 50.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Layanan danKonsultasi Pajak Daerah | 11 Layanan | 50.000.000,00 | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan Persentase Realisasi Pajak Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 8529 Dokumen | 4 Laporan 85.50 % | 157.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitiandan Verifikasi | 8529 Do kumen | 157.000.000,00 | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 11 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | |
|------|----|----|------|----|--|---|---|---|------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif(Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan Persentase Realisasi Pajak Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 8400 Dokumen | 4 Laporan 85.50 % | 720.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPenagihan Pajak Daerah | 8400 Do kumen | 720.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan Persentase Realisasi Pajak Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 105 Dokumen | 4 Laporan 85.50 % | 350.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Dokumen Hasil PenyelesaianKeberatan Pajak Daerah | 105 Dok umen | 350.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan Persentase Realisasi Pajak Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 12 Dokumen | 4 Laporan 85.50 % | 256.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Penge- daliandan Pengawasan Pajak Daerah | 12 Doku men | 256.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan PengelolaanRetribusi Daerah | Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan Persentase Realisasi Pajak Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 12 Laporan | 4 Laporan 85.50 % | 100.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaandan PengawasanPengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 15 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan Persentase Realisasi Pajak Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 2 Laporan | 4 Laporan 85.50 % | 100.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Laporan Perk embangan El ektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 2 Laporan | 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 10.292.926.000,00 | | | | 8.345.230.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | 78.530.000,00 | | | | 78.530.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 2 Dokumen | 26 Dokumen | 67.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 67.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |



| Kode | | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | |
|------|----|----|------|----|---|--|--|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|---|-----------|------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif(Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 1 Dokumen | 26 Dokumen | 1.925.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.925.000,00 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan | Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 1 Dokumen | 26 Dokumen | 1.925.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.925.000,00 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 1 Dokumen | 26 Dokumen | 1.732.500,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah DokumenDPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD | 1 Dokumen | 1.732.500,00 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan | Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 1 Dokumen | 26 Dokumen | 1.732.500,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.732.500,00 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |



| Kode | | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | |
|------|----|----|------|--|--|---|---|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--------------------|------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif(Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 13 Laporan | 26 Dokumen | 2.015.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | 13 Laporan | 2.015.000,00 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 4 Laporan | 26 Dokumen | 2.200.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 2.200.000,00 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 6.231.000.000,00 | | 6.247.304.000,00 | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 33 Orang/bulan | 27 Dokumen | 6.000.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang /bulan | 6.000.000.000,00 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 12 Dokumen | 27 Dokumen | 150.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Dokumen Pe natausahaan dan Penguja n/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Doku men | 150.000.000,00 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 1 Laporan | 27 Dokumen | 78.500.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 94.804.000,00 | | |



| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | |
|------|----|----|------|----|---|---|--|---|------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif(Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | | | | | Target | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 12 Laporan | Dokumen | 27 2.500.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | 12 Laporan | 2.500.000,00 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 1.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Dokumen Pengamanan BarangMilik Daerah SKPD | 1 Dokum en | 1.000.000,00 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | 188.400.000,00 | | | | 188.400.000,00 | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 64 Paket | 1 Dokumen | 38.400.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan | 64 Paket | 38.400.000,00 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 5 Orang | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 75.000.000,00 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 15 Orang | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Orang yang Mengikuti BimbinganTeknis ImplementasiPeraturan Pe rundang-Und an | 15 Orang | 75.000.000,00 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 500.000.000,00 | | | | 576.000.000,00 | | | | |



| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | |
|------|----|----|------|----|--|---|--|---|------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|---|------------------------|----------------|
| | | | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif(Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | Hasil Kegiatan | | Tolok Ukur | | | Target | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 1 Paket | 7 Dokumen | 10.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Paket Komponen InstalasiListr ik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 10.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 4 Paket | 7 Dokumen | 140.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Paket Peralatan danPerlengk apakantor yang Disediakan | 4 Paket | 140.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 2 Paket | 7 Dokumen | 74.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan | 2 Paket | 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan | Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 2 Paket | 7 Dokumen | 76.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Paket Barang Cetak danPenggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 76.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 25 Laporan | 7 Dokumen | 200.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Laporan Pen yelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 2.451.000.000,00 | | 411.000.000,00 | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 1 Unit | 7 Dokumen | 30.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Unit Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 30.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | |
|------|----|----|------|----|--|---|--|---|------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif(Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 50 Unit | 7 Dokumen | 150.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Paket Mebelyang Disediakan | 50 Unit | 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 50 Unit | 7 Dokumen | 195.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan | 50 Unit | 195.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 1 Unit | 7 Dokumen | 2.000.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Unit GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 8 Unit | 7 Dokumen | 46.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Unit Saranadan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 5.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 30 Unit | 7 Dokumen | 30.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Unit Saranadan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 30 Unit | 30.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 599.050.000,00 | | | | | 599.050.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | - | 12 Laporan | 25 Dokumen | 1.050.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat | 12 Laporan | 1.050.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | 12 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|------|----|---|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|---|---|------------------------|----------------|---|--|--|--|
| | | | | | | - | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | - | 12 Laporan | Dokumen | 326.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 326.000.000,00 | | | | |
| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif(Rp.) | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | - | 12 Laporan | 25 Dokumen | 272.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan UmumKantor yang Disediakan | 12 Laporan | 272.000.000,00 | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 243.946.000,00 | 243.946.000,00 | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 1 Unit | 7 Dokumen | 31.846.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yangDipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 31.846.000,00 | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 25 Unit | 7 Dokumen | 98.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yangDipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 25 Unit | 98.000.000,00 | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 85 Unit | 7 Dokumen | 80.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara | 85 Unit | 80.000.000,00 | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 % | 1 Unit | 7 Dokumen | 34.100.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 34.100.000,00 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 14.915.904.000,00 | | | 12.968.208.000,00 | | | | | | | |



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan berisikan Tujuan. Sasaran. Kebijakan dan Program Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2024 untuk menjawab atau meminimalisir isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan di bidang Pendapatan Daerah. Sebagai tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Demikian Ranwal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga program dan kegiatan tersebut dapat dicapai secara baik dan maksimal.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan dan perbaikan penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang.



LAMPIRAN